

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

Pentingnya pembangunan nasional cukup beralasan jika setiap Negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment) untuk menanamkan modal di negaranya, dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. Arti pentingnya kehadiran investor asing ialah bahwasanya eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstraktif dengan ciri utama pada padat modal dan berteknologi tinggi (Katherine Baicker, 2014).

Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke negara ini Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relative stabil, peningkatan stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat pembangunan ekonomi kearah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional (Noah De Lissovoy & Peter McLaren, 2013).

Permodalan yang diperlukan oleh negara untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal (Lindsay Amiel, 2014).

Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecendrungan

berkurangnya arus masuk investasi global Sampai saat ini terdapat beberapa masalah pokok yang masih sering dikeluhkan para investor dalam berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain kurangnya rasa kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal , terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penanam modal (investor) dalam berbisnis dan memperlakukan mereka secara adil (Dwi Setiawan, 2001).

Kota Medan, sebagai salah satu daerah yang menjalani pelaksanaan otonomi daerah, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lingkungan bisnis yang strategis. Sebagaimana diketahui, setelah masa krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, iklim penanaman modal (Investasi) di kota Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh letak geografis dan potensi demografis Kota Medan yang cukup strategis tetapi juga didukung juga oleh kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu (Website Pemko Medan, 2014).

Masalah lain yang timbul berkenan dalam iklim penanaman modal ini adalah persepsi rendahnya kepastian hukum, juga tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpang siuran wewenang antara Pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang berasal dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini

mengakibatkan ketidak jelasan kebijakan investasi nasional, yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Disisi lain penerapan peraturan daerah (Perda) lebih didorong oleh keinginan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah secara berlebihan, yang dkuatirkan dapat merugikan pembangunan kota (Profil BPM Kota Medan, 2014).

Pemerintah Indonesia mencatat Kota Medan memberikan sumbangan investasi untuk pemerintah pusat sampai triwulan ketiga tahun 2010 sebesar 75.880.511,91 dolar Amerika Serikat dari PMA berjumlah 23 perusahaan dan sebesar Rp.511.309.056.125 dari PMDN berjumlah 9 perusahaan.

“Saya yakin jumlah ini bisa bertambah lagi jika dikelola dengan lebih baik lagi. Untuk itu saya menyambut baik dilakukannya rapat koordinasi ini,” Dadang Mulyani (BKPM Pusat, 25/11/2010)

Seperti yang dikutip melalui Harian Tribun Medan (23/11/2011) Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Medan Rismaria Hutabarat mengatakan :

Saat ini masih sedikit investor yang mau menanamkan modalnya ke Kota Medan. Menurutny ada beberapa hal penyebabnya. Pertama, masalah keamanan dan kenyamanan. Karakter masyarakat dan birokrasi yang membuat investor tidak nyaman. Kedua, masalah infrastruktur yang belum terlalu mendukung. Ketiga, masalah perizinan yang sulit. Izin investasi itu harusnya sudah di BPM. Rencananya 2012 sudah keluar perdanya tentang penanaman modal daerah Kota Medan. Yang jelas, kami mendatangkan investor untuk kesejahteraan rakyat.

Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan merupakan badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal di Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan

Nomor 54 Tahun 2010 Badan Penanaman Modal Kota Medan mempunyai fungsi antara lain (Profil BPM Kota Medan, 2014) :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Melalui visi dan misi yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Kota Medan, maka masyarakat sudah dapat memperoleh data dan informasi seputar potensi, peluang dan regulasi penanaman modal baik secara langsung maupun melalui website www.investmedan.com, terjalannya kerjasama antara pemerintah kota dengan stakeholder dunia usaha dalam mengembangkan iklim usaha di Kota Medan, diperolehnya bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan penanaman modal (Profil BPM Kota Medan, 2014).

Dengan pentingnya tugas penyelenggaraan yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal, maka BPM Kota Medan haruslah konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain dengan menerapkan disiplin yang tinggi, kesadaran dan kepatuhan terhadap segala ketentuan yang berlaku sehingga mampu menjalankan dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan sehingga tercipta suatu “good governance” yang memerlukan keterpaduan

langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban dalam setiap penyelenggaraannya.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik namun sebenarnya agak terlalu luas untuk didefinisikan, akan tetapi hal ini sering digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Dwi Setiawan, 2001).

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sampai tahun 2015, keterpaduan kebijakan dan program penanaman modal secara regional pada tingkat provinsi dan nasional masih harus terus ditingkatkan, walaupun secara normative rencana penanaman modal yang telah ditetapkan telah didasarkan visi, misi dan tujuan Badan Penanaman Modal Kota Medan. Namun demikian secara implemantatif tidak seluruh agenda prioritas penanaman modal dapat diimplementasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut dapat diamati dari presentasi agenda prioritas peningkatan penanaman modal dalam RPJMD yang dapat ditampung dalam RKPD dalam setiap tahun anggaran yang rata-rata masih \pm 50-60 persen dan persentase program penanaman modal yang ditetapkan dalam renstra Badan Penanaman Modal Kota Medan yang

dapat ditampung dalam Renja-SKPD yang baru sekitar 50-60 persen. Oleh karena itu rencana penanaman modal selalu dipengaruhi konsistensi antara perencanaan dengan penganggarannya (Renstra BPM Kota Medan 2011-2015).

Kualitas rencana penanaman modal selama ini juga tidak terlepas dari dukungan ketersediaan data dan informasi yang terbatas, serta rendahnya programdan kegiatbn penyusunan kerangka studi, instrument analisis dan studi-studi terapan yang dilakukan, termasuk koordinasi. Akibatnya lebih jauh dari keterbatasan dan factor-faktor di atas adalah masih rendahnya tingkat pengintegrasian dan keterpaduan kebijakan, program kegiatan dan pendanaan antara SKPD dan antara SKPD dengan SKPD lainnya secara hirarki, termasuk masih lemahnya tolak ukur yang digunakan dalam evaluasi kinerja yang diselenggarakan (Renstra BPM Kota Medan 2011-2015).

Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Bachtiar Arif, 2008).

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : “Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, jelas bahwa Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah yang lebih bersifat spesifik, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan ditinjau dari aspek : input, proses, output dan outcomes.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan adalah ;

1. Dapat memberikan manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik bagi BPM Kota Medan.

2. Sebagai masukan bagi siapa saja yang tertarik dengan permasalahan yang dibicarakan didalam penelitian ini.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kota Medan.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam enam bab, yaitu :

- Bab I terdiri dari : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II terdiri dari : Tinjauan Pustaka yang meliputi Teori Akuntabilitas dan Teori Kinerja.
- Bab III terdiri dari : Metode Penelitian yang meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Dokumentasi dan Pengamatan) serta Teknik Analisis Data.
- Bab IV terdiri dari : Deskripsi Lokasi Penelitian yang meliputi, Gambaran Umum Kota Medan dan Gambaran Umum Badan Penanaman Modal Kota Medan.
- Bab V terdiri dari : Hasil Analisa dan Pembahasan yang meliputi, Sumber Daya BPM, Perencanaan BPM, Hasil Wawancara dan Permasalahan yang Dihadapi oleh BPM Kota Medan.
- Bab VI terdiri dari : Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan mengenai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Penanaman Modal Kota Medan.